

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka ada dua kesimpulan yang dapat ditarik dan juga dua saran yang dapat diusulkan.

1. Pengambil alihan saham PT. PPCI berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas No. 108 tanggal 21 Februari 2005 yang dibuat dihadapan Melania Miensye Hambali, Notaris di Balikpapan merupakan suatu peristiwa hukum berupa penjualan dan pembelian saham atau dikenal sebagai pemindahan hak atas saham yang dilakukan dengan suatu pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan ketentuan Pasal 56 di atas, akuisisi atau pengalihan saham merupakan perbuatan hukum internal dari suatu badan hukum korporasi. Perbuatan ini tidak perlu mendapatkan persetujuan menteri, tetapi perbuatan hukum ini harus dilaporkan kepada menteri dan harus dimasukkan dalam daftar khusus sebagaimana yang diharuskan oleh Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Jadi peristiwa hukum ini tidak sama

dengan peristiwa pemindahan hak atas saham atau pengalihan kepemilikan saham di pasar modal sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Ayat (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa peristiwa

hukum berupa penjualan dan pembelian saham di PT. PPCI bukan pula merupakan peristiwa hukum memindahkan atau menjual belikan Kuasa Pertambangan Eksploitasi kepada pihak lain, sebagaimana diatur Pasal 93 Ayat (3) yang mengharuskan pengalihan kepemilikan atas saham harus memberitahu Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota.

2. Tanggungjawab hukum pihak pengakuisisi terhadap pihak terakuisisi sebenarnya tidak mempunyai tanggung jawab hukum apapun, kecuali memang dapat dibuktikan pihak pengakuisisi melakukan itikad yang buruk dalam proses akuisisi maupun setelah akuisisi yang dapat merugikan pihak lain termasuk pihak ketiga sehingga ia dapat dimintakan pertanggungjawaban langsung melalui pengadilan atau cara lainnya. Sedangkan tanggung jawab hukum pihak terakuisisi ia harus melakukan proses administratif kepada instansi terkait yaitu Kementerian ESDM untuk memenuhi ketentuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 93 Undang-Undang Minerba. Pihak yang mengakuisi perusahaan pemilik IUP memiliki kewajiban yang sama dengan pihak terakuisi. Pihak pengakuisisi harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang berupa kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kepada pemegang IUP, seperti ketentuan Pasal 95 s/d 112 Undang-Undang Minerba.

## **B. Saran-Saran**

1. Untuk memberikan kepastian hukum, peraturan tentang akuisi saham perusahaan pemegang IUP harus dibuat secara khusus. Oleh karena itu,

disarankan kepada Menteri ESDM untuk membuat peraturan khusus tentang akuisi saham perusahaan pemegang IUP.

2. Untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pemilik modal pada perusahaan baik yang mengakuisisi maupun yang terakuisisi dan untuk menjamin bahwa kewajiban-kewajiban pemegang IUP, maka disarankan agar Menteri ESDM memasukan klausula ini kedalam peraturan menteri yang dimaksudkan pada Saran No. 1.

